Pemisahan Gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perspektif Hukum Materiil dan Penerapan di Pengadilan

Maralutan Siregar¹, Tan Kamello², Hasim Purba³, Rosnidar Sembiring⁴.

¹Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

E-mail: marasiregar30@gmail.com (CA)

^{2,3,4} Dosen Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

Abstrak: Penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum terdapat dalam 4 (empat) putusan Pengadilan Negeri Medan, Keempat putusan yang berbeda penafsiran oleh majelis hakim, ada dua putusan yang diterima yaitu Putusan Nomor 728/Pdt.G/2016/PN Mdn., dan Putusan Nomor 584/Pdt.G/2014/PN Mdn, sedangkan dua putusan yang tidak diterima, yaitu Putusan Nomor 280/Pdt.G/2018/PN Mdn. dan Putusan Nomor 320/Pdt.G/2019/PN Mdn. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis tentang gugatan wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam perspektif hukum materiil; Landasan hukum pemisahan gugatan wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam perspektif hukum materiil dan menurut persepsi hakim Pengadilan Negeri Medan dan Advokat; Kriteria pemisahan gugatan wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam pandangan hakim di Pengadilan Negeri Medan dan Advokat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif bersifat deskriptif, digunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian disimpulkan bahwa gugatan wanprestasi harus didasari dengan ada perikatan/perjanjian terdapat Pasal 1234 KUHPerd., dan timbulnya hak menuntut pada prinsipnya membutuhkan somasi. Sedangkan PMH aturan tertuang dalam Pasal 1365 KUHPerd., Perbuatan yang melanggar hukum (undang-undang) atas perbuatannya menimbulkan kerugian kepada orang lain, dan hak tanpa somasi. Sehingga kedua pasal tersebut menjadi pemisah antara gugatan wanprestasi dan PMH. Maka dalam penyusunan gugatan harus benar-benar diperhatikan mengenai persyaratan gugatan yakni syarat formil dan syarat materiil sesuai dengan Pasal 8 nomor 3 Rv, supaya gugatan dapat di terima antara posita dan petitum harus sejalan. Keputusan Mahkamah Agung Nomor 1875/K/Pdt./1984 dan dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor 879 K/Pdt./1997, penggabungan gugatan wanprestasi dan sekaligus gugatan PMH merupakan suatu pelanggaran terhadap tertib beracara di Pengadilan. Gugatan wanprestasi harus didasari adanya perjanjian yang dilakukan antara penggugat dan tergugat. Karna gugatan wanprestasi lahir disebabkan adanya perjanjian, sedangkan Perbutan melawan hukum disebabkan karna undang-undang. Dari segi unsur-unsurnya terdapat perbedaan baik dari segi sanksi, yang mana wanprestasi ganti ruginya secara rinci di atur dalam Undang-undang, sedangkan PMH tidak di atur.

Katakunci: Pemisahan Gugatan, Perbuatan Melawan Hukum, Wanprestasi.

Sitasi: Siregar, M., Kamello, T., Purba, H., & Sembiring, R. (2023). Pemisahan Gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perspektif Hukum Materiil dan Penerapan di Pengadilan . *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(6), 532–548. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i6.187>

1. Pendahuluan

Gugatan yang diajukan ke pengadilan mestilah dibuat dengan seksama dengan memperhatikan berbagai segi dan dalil, kecocokan peristiwa dan hukum di dalamnya, agar gugatan bisa diterima dan gugatan dapat dikabulkan oleh majelis hakim, karena di pengadilanlah setiap pihak dapat mencari keadilan dan kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dan untuk mempertahankan dan mendapatkan haknya kembali. Pasal 118 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) pada bagian penjelasan disebutkan, surat gugatan berisi tentang identitas para pihak (*introductief rekest*), posita (keterkaitan antara pihak penggugat dan tergugat dalam suatu perkara yang dituntut dan alasan tuntutan), dan yang terakhir berisi tuntutan itu sendiri (*petitum*). Disebutkan juga, terkait dengan gugatan tidak mesti dilakukan dengan tulisan, dapat juga disampaikan langsung dengan lisan, dan pihak pengadilan mesti mencatatkan gugatan tersebut (Pasal 120 HIR).

Hukum acara perdata materiil menyebutkan gugatan dengan istilah *fundamentum patendi* atau posita. Posita sendiri terdiri dari dua bagian, yakni alasan-alasan sesuai dengan keadaan, dan alasan-alasan hukum. Surat gugatan harus berisi tuntutan (*petitum*). Surat gugatan perkara diajukan di tempat Pengadilan Negeri tempat tergugat (*defendant*) berdomisili, bukan di tempat penggugat (*plaintiff*) sesuai dengan asas *distributie van rechtsmacht* atau dalam bahasa latinnya *actor sequitur forum rei* sesuai dengan Pasal 118 HIR (Sutantio & Oeripkartawinata, 2009).

Permasalahan yang sering diajukan ke pengadilan negeri khususnya Pengadilan Negeri Medan terkait dengan wanprestasi dan Perbuatan Melanggar Hukum . Tuntutan perkara wanprestasi dan Perbuatan Melanggar Hukum di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd.) pada pasal yang berbeda, wanprestasi di atur dalam Pasal 1234 dan tentang prestasi diatur dalam Pasal 1243 KUHPerd. Perbuatan Melawan Hukum terdapat dalam Pasal 1365 dan 1366 KUHPerd.

Diketahui dari pasal-pasal tersebut, terdapat perbedaan yang signifikan antaran pasal wanprestasi dan prestasi dengan yang terdapat pada pasal Perbuatan Melawan Hukum. Pasal wanprestasi cenderung terukur, dan hanya seputar perjanjian kerjasama atau kontrak yang dilakukan oleh kedua pihak yang melakukan perikatan, dan ganti ruginya berupa pengembalian biaya, denda atau keuntungan yang harusnya didapatkan dari kreditur. Ganti rugi dalam pasal Perbuatan Melawan Hukum sangat luas sekali, mencakup kerugian materiil dan immateriil, dan tidak terukur, sehingga ganti rugi yang dibebankan kepada tergugat mampu menyampai nilai uang yang cukup tinggi. Harumi dan Pranoto menyebutkan, bentuk kerugian immateriil dapat berupa keterkejutan, sakit, ketakutan, kesenangan hidup dan beban psikologis lainnya (Chandraresmi, 2016).

Gugatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Medan, terdapat gugatan yang menggabungkan perkara wanprestasi dengan perkara gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Penggabungan gugatan perkara dalam satu tuntutan, menurut M. Yahya Harahap (2017) "dibolehkan dalam batas-batas tertentu, yakni perkara berhubungan erat atau terkoneksi (*innerlijke samenhangen*). Hukum acara perdata baik yang

bersumber dari HIR., R.Bg., BW., tidak ada mengatur dan tidak ada melarang. Khusus di dalam RV (*Reglement of de Burgerlijke Rechtsvordering*) terdapat aturan dibolehkannya menggabungkan gugatan pada perkara hak menguasai (*bezit*) dengan tuntutan hak milik.”

Permasalahannya adalah tidak semua gugatan yang menggabungkan perkara wanprestasi dengan perkara gugatan Perbuatan Melawan Hukum diterima oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Medan, banyak juga perkara yang digagalkan atau tidak diterima oleh Pengadilan Negeri Medan dan diputuskan untuk ditolak gugatan perkara penggabungan perkara wanprestasi dengan perkara gugatan Perbuatan Melawan Hukum .

Terdapat beberapa putusan yang diakses dari website resmi Pengadilan Negeri Medan tentang adanya penggabungan tuntutan wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum yang diterima, dan ada yang ditolak. Penggabungan tuntutan yang diterima terdapat dalam putusan: Putusan Nomor 280/Pdt.G/2018/PN Mdn., dan Putusan Nomor 320/Pdt.G/2019/PN Mdn. Penggabungan tuntutan yang diterima terdapat dalam putusan: Putusan Nomor 584/Pdt.G/2014/PN Mdn., Putusan Nomor 728/Pdt.G/2016/PN Mdn.

Beragam macamnya putusan hakim di Pengadilan Negeri Medan tentunya membuat pihak yang berperkara, maupun pihak advokat yang membantu untuk itu merasa dirugikan terhadap gugatan mereka ditolak disebabkan adanya surat gugatan yang menggabungkan perkara wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum , dan ini berakibat munculnya persepsi atau praduga terhadap penegak hukum dalam hal ini hakim melakukan pembedaan dalam putusan dalam perkara yang sama, padahal dalam amanah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat (1) menegaskan tidak boleh adanya sikap dari pengadilan yang membeda-bedakan pihak pencari keadilan di setiap pengadilan, bunyi ayatnya: “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.

Selain permasalahan terdapat dualisme putusan terhadap gugatan wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum , ingin diketahui penyebab surat gugatan seringkali digabungkan perkara wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum , padahal kedua perkara berbeda, sehingga bisa dilakukan dua kali gugatan. Anggapan sementara, hal ini dilakukan dengan adanya iktikad dari pihak penggugat untuk mendapatkan keuntungan lebih ketika perkara perjanjian ditautkan dengan perkara Perbuatan Melawan Hukum , karena dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum pihak tergugat dapat menuntut selain kerugian materiil (yang sifatnya terukur) dan kerugian immateriil yang tidak terukur dan dapat bernilai tinggi (Hutagalung, 2019).

Menjadi keinginan untuk mendapatkan kepastian mengenai wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam aturan perundang-undangan sebagai hukum perdata materiil menjadi penting untuk diuraikan, agar tidak terjadinya kesalahan dalam mengambil aturan perundang-undangan dalam membuat suatu gugatan wanprestasi dan gugatan Perbuatan Melawan Hukum . Begitu juga halnya ini menjadi penting, agar tidak terjadinya *missperception* (salah persepsi) dan salahnya melakukan

penafsiran terhadap aturan baku yang dijadikan rujukan oleh hakim Pengadilan Negeri Medan.

Selain hal di atas, perlu adanya pengkajian secara menyeluruh dan terukur terhadap bentuk gugatan wanprestasi dan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam aturan materil dalam persepsi dua penegak hukum, yakni hakim Pengadilan Negeri Medan, dan juga advokat yang ada di Kota Medan. pengkajian terhadap persepsi hakim dan advokat teramat penting, karena merekalah sebagai pelaksana dalam melakukan pengayoman dan juga memberikan keadilan bagi pencari keadilan, terkait dengan adanya dugaan tindakan wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum terhadap klien kerja misalnya, atau sejenis perkara yang sama dalam ikatan perjanjian atau tidaknya, tapi masuk dalam kategori perkara wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum .

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dengan teknik studi kepustakaan untuk mendapatkan data yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Setelah data terkumpul, kemudian diolah serta dianalisis secara kualitatif.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perspektif Hukum Perdata Materil

Gugatan adalah suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui pengadilan. Suatu perkara perdata sekurang-kurangnya terdapat di dua pihak yang berperkara, yaitu pihak penggugat yang mengajukan gugatan dan pihak tergugat. Penggugat adalah orang yang merasa dilanggar haknya dan tergugat merupakan orang yang di tarik ke muka pengadilan karena melanggar hak orang lain. Akantetapi seseorang yang digugat tidak dapat di nyatan melanggar hak seseorang sebelum adanya putusan pengadilan (Sabda, 2015).

Gugatan atas konflik hendak diselesaikan berdasarkan putusan pengadilan, kalah atau menangnya perkara tergantung proses hukumnya. Sehingga dalam menentukan perkara harus teliti dan landasan hukum dalam perkara harus duduk terhadap kasus yang ingin di gugat. Suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat agar dapat diterima oleh pengadilan haruslah memenuhi syarat-syarat dan atau ketentuan-ketentuan yang ada dalam HIR maupun RBg, dalam teknik penyusunan gugatan harus benar-benar diperhatikan mengenai persyaratan gugatan yakni syarat formil dan syarat materil sesuai dengan Pasal 8 nomor 3 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) suapaya gugatan dapat di terima dan prosedur yang harus dilaksanakan terhadap pengajuan gugatan tersebut, sebagaimana syarat formil dan syarat materil (Asikin, 2019).

Syarat formil suatu gugatan adalah syarat untuk memenuhi ketentuan tata tertib beracara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Jika syarat formil tidak terpenuhi, maka gugatan akan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) atau pengadilan tidak berwenang mengadili (Munawaroh, 2022).

Yahya Harahap (2017) menyatakan sebagai syarat-syarat Formil dalam membuat gugatan yairu (1) Ditunjukkan (dialamatkan) Kepada Pengadilan Negeri sesuai dengan kompetensi relatif; (2) Diberi tanggal; (3) Ditanda tangani penggugat atau Kuasa hukumnya. Sedangkan Merurut Laila M. Rasyid dan Herinawati (2015) Suatu gugatan hendaklah memenuhi ketentuan-ketentuan Syarat Formal, sebagai berikut.

Penegasan ini tercantum dalam pasal 118 ayat (1) HIR yang merumuskan: "gugatan perdata yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan negeri harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut Pasal 123, kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, Tempat tinggal sebetulnya." Dari penjelasan tersebut, maka adapun syarat formil yang harus terpenuhi dalam surat gugatan adalah (1) Tidak melanggar kompetensi/kewenangan mengadili, baik kompetensi absolut maupun relatif; (2) Gugatan tidak mengandung *error in persona*; (3) Gugatan harus jelas dan tegas. Jika gugatan tidak jelas dan tidak tegas (*obscuur libel*) dapat mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak diterima. Misalnya posita bertentangan dengan petitum; (4) Tidak melanggar asas *ne bis in idem*. Artinya gugatan tidak boleh diajukan kedua kalinya apabila subjek, objek dan pokok perkaranya sama, di mana perkara pertama sudah ada putusan inkracht yang bersifat positif yaitu menolak atau mengabulkan perkara; (5) Gugatan tidak prematur atau belum saatnya menggugat sudah menggugat; (6) Tidak menggugat hal-hal yang telah dikesampingkan, misalnya gugatan kedaluwarsa; (7) Apa yang digugat sekarang masih dalam proses peradilan (*aanhanging geding/rei judicata deductae*). Misalnya ketika perkara yang digugat sudah pernah diajukan dan sedang proses banding atau kasasi (Munawaroh, 2022).

Syarat materiil gugatan adalah syarat yang berkaitan dengan isi atau materi yang harus dimuat dalam surat gugatan. Dalam arti lain, syarat materiil merupakan substansi pokok dalam membuat surat gugatan. Isi surat gugatan atau syarat materiil surat gugatan mengacu pada Pasal 8 ayat 3 Rv yang pada pokoknya harus memuat (1) Identitas para pihak; (2) Dasar Gugatan atau Fundamentum Petendi atau Posita berisi tentang: kejadian, peristiwa (*feitelijke gronden*) menjelaskan duduknya perkara dan menguraikan tentang hukumnya (*recht s gronden*) di uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis gugatan; dan (3) Petitum atau Tuntutan (Safira, 2017).

Syarat substantif, yaitu: Identitas para pihak, Posita dan Petitum. Identitas yaitu nama lengkap, umur/tempat dan tanggal lahir, pekerjaan dan alamat atau domisili. Dalam hal badan hukum, harus disebutkan nama badan hukumnya, dan nama orang yang berwenang mewakili badan hukum tersebut menurut anggaran dasar atau peraturan yang berlaku. Jika merupakan cabang dari badan hukum, maka tetap harus

disebutkan identitas badan hukum tersebut. Jika gugatan diajukan kepada beberapa orang/badan hukum, maka harus dikualifikasikan sebagai Tergugat I, Tergugat II dst. Jika gugatan diajukan oleh beberapa orang, maka harus dikualifikasikan sebagai Penggugat I, Penggugat II dst. Penggugat harus benar-benar pihak yang berhak untuk mengajukan gugatan tersebut. Jika diajukan oleh orang yang tidak berhak, maka gugatan tidak dapat diterima. Penggugat harus benar-benar lengkap (semua sudah termasuk). Jika gugatan tidak lengkap para pihaknya, maka gugatan akan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) (Yulia, 2018).

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas yang menjadi syarat-syarat dalam membuat gugatan, harus di perhatikan secara detail atau teliti dalam pembuatan gugatan untuk menghindari gugatan tidak dapat diterima atau gugatan di tolak. Hubungan yang erat antara hukum perdata (hukum formil) dengan hukum acara perdata (hukum materiil), dimana secara garis besarnya dapatlah dikemukakan di sini bahwa hukum acara perdata berfungsi untuk mempertahankan atau menegakkan hukum perdata, sehingga dengan adanya hukum acara perdata ini sebagai prosedur atau pedoman dalam menjalankan persidangan di pengadilan.

Mengenai gugatan Wanprestasi dan gugatan Perbuatan Melawan Hukum , jelas terdapat dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor 1875/K/Pdt./1984 dan dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor 879 K/Pdt./1997. Kedua keputusan dari Mahkamah Agung menegaskan, penggabungan gugatan wanprestasi dan sekaligus gugatan Perbuatan Melawan Hukum merupakan suatu pelanggaran terhadap tertib beracara di pengadilan. Kedua perkara sifatnya berdiri sendiri, sehingga harus diselesaikan satu persatu, atau diselesaikan dalam berkas tuntutan perkara yang berbeda.

Terdapat adanya penggabungan gugatan wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum , maka majelis hakim dapat menyatakan bahwa gugatan *obscuur libel* atau tidak jelas sehingga ditolak. Kemudian, masing-masing gugatan yakni gugatan wanprestasi dan gugatan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan pasal yang berbeda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd.), kalau gugatan wanprestasi terdapat Pasal 1234 KUHPerd., sedangkan mengenai Perbuatan Melawan Hukum aturan tertuang dalam Pasal 1365 KUHPerd., sampai dengan Pasal 1380. Sebab itu, kedua perkara mesti diselesaikan dalam gugatan yang berbeda, tidak boleh ada penggabungan gugatan.

Menurut Bambang Joko Winarno (2021) Hakim Pengadilan Negeri Kota Medan dalam wawancara menerangkan "dari sudut pandang hukum materiil atau undang-undang, tidak ada larangan secara tegas terhadap penggabungan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, akan tetapi bahwa, dalam putusan hakim-hakim terdahulu ada melarang penggabungan dan wanprestasi berdasarkan yurisprudensi". Hakim dalam memutus bebas tapi bukan berarti sebabas-bebasnya tetap ada koridornya, karena berkaitan hukum perdata hukum formil tidak boleh di simpangi, tapi kalau hukum materiil tergantung penafsiran hakim masing-masing terhadap fakta-fakta yang ada di dalam persidangan. Putusan-putusan dalam perkara-perkara tertentu ada yang memperbolehkan di gabungkan dan ada yang tidak. Tergantung masalah yang

bersangkutan kes by kes. prinsipnya tidak boleh, tapi dalam perkara-perkara tertentu di perbolehkan, Tergantung fakta hukumnya.

Ali Leonardi (2021) dalam wawancara memberikan pandangannya terhadap Wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, ia menerangkan bahwa konsep perikatan diatur dalam Buku III KUHPerduta. Wanprestasi mempunyai makna yaitu debitor tidak melaksanakan kewajiban prestasinya atau tidak melaksanakannya sebagaimana mestinya sehingga kreditor tidak memperoleh apa yang dijanjikan oleh pihak lawan. Adapun pengertian urnum tentang wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Dasar wanprestasi ini timbulnya dari suatu perjanjian dimana dalam pelaksanaannya salah satu pihak tidak menepatinya. Tentang hal ini pengaturannya terdapat dalam Pasal 1235 KUHPerduta sampai dengan Pasal 1252 KUH perdata". Sementara Perbuatan Melawan Hukum yaitu Perbuatan yang melanggar hak (subyektif) orang lain atau perbuatan (atau tidak berbuat) yang bertentangan dengan apa yang menurut hukum tidak tertulis yang seharusnya dijalankan oleh seorang dalam pergaulannya dengan sesama warga masyarakat dengan mengingat adanya alasan pembenar menurut hukum. Hal ini diatur didalam Pasal 1365 KUHPerduta sampai dengan Pasal 1380 KUHPerduta".

Mengulas terkait apakah terdapat adanya larangan dalam penggabungan gugatan yang berisi wanprestasi dan PMH dalam satu gugatan. Ranto Sibarani (2021) dalam wawancara mengemukakan sumber hukum wanprestasi dari 1243 KUHPerduta dan perbuatan melawan hukum 1365 KUHPerduta. Hak menuntut ganti rugi wanprestasi tibul dari pasal 1243, hak menuntut ganti rugi dari PMH tidak perlu somasi karena perbuatan melawan hukum, sedangkan perbuatan wanprestasi perlu melakukan somasi terlebih dahulu. Kemudian ganti rugi kalau KUHPerduta telah megatur tentang kerugian, perbuatan melawan hukum tidak di atur bagaimana ganti ruginya. Sehingga gugatan sesuai dengan yang nyata dan kerugian imaterilnya, sedangkan wanprestasinya diatur ada jangka waktu perhitungan ganti ruginya, misalnya utang piutang". Segi sanksinya terhadap perbuatan melawan hukum ada sanksi materiil dan inmateriilnya, namun wanprestasi hanya hanya sanksi materiil saja. Sesuai referensi Yahya Harahap, bahwa soal aturan yang berlaku tidak pernah ada larangan di gabungkan, tetapi Yahya Harahap berpendapat tidak dibenarkan mencampur adukkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam gugatan mengutip Putusan Mahkamah Agung Nomor: 879/kasasi/perdata/1997".

Ranto Sibarani (2021) mempertegas "mengenai penggabungan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan, Mahkamah Agung pernah mengeluarkan yurisprudensi mengenai masalah penggabungan yaitu dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1875 Tahun 1984 penggabungan perbuatan perbuatan melawan hukum dalam perbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula. yurisprudensi yang pernah ada. Soal kalamat dari Mahkamah Agung penggabungan tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara, tetapi kemudian hal tersebut bisa dibantahkan dengan adanya putusan Yurisprudensi."

Berdasarkan yurisprudensi menegenai gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum tidak boleh dalam satu gugatan, menjadikan dasar terhadap kepastian hukum demi ketertiban hukum acara. Sebagaimana konsep kepastian hukum mencakup sejumlah yang saling mengkait, sebagai aspek dari kepastian hukum merupakan perlindungan yang diberikan terhadap individu kesewenangan individu lain, sehingga kebebasan hakim dalam menafsirkan hukum materil mempunyai batasan dengan ada aturan yurisprudensi tersebut.

Hukum materil sebagaimana dalam Pasal 1342 dan Pasal 1365 KHUPer., secara jelas membedakan anantara wanpresatsi dan perbuatan melawan hukum baik dasar hukumnya maupun unsur-unsurnya. Sehingga, hukum materil sudah memberikan suatu kepastian terhadap gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum . Maka hal tersebut sejalan dengan apa yang disampaikan Satjipto Rahardjo yang mengatakan bahwa ada 4 (empat) hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum diantaranya (1) Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches recht*) yang tertuang di dalam KUHPer; (2) Bahwa hukum ini didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti "kemauan baik", "kesopanan"; (3) Bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping juga mudah dijalankan; (4) Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah (Satjipto, 2006).

Berdasarkan uraian di atas jelas tergambar makna gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum di atur secara terpisah dan pada pasal yang berbeda dalam KUHPerd., dengan demikian antara suatu sebab dan akibat timbulnya kerugian harus dimaknai terlebih dahulu, apakah lahir karna adanya suatu perikatan sebagai perbuatan awal hubungan hukum atau tidak didasari adanya suatu perikatan. Hal tersebut sudah jelas membawa suatu produk hukum pengadilan dalam memutus suatu perkara yang memenuhi adanya suatu gugatan yang benar dan baik secara formil dan materil, agar suatu putusan yang diberikan menjadi jelas dari adanya gugatan dengan duduk perkara yang sesuai pada faktanya dengan didukung adanya suatu dasar hukum yang menjadi dasar gugatan.

3.2 Landasan Hukum Pemisahan Gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perspektif Hukum Materil

Keterangan yang didapatkan, terdapat landasan hukum berupa Keputusan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, tentang larangan menggabungkan gugatan wanprestasi dan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam satu surat gugatan. Adapun keputusan dari Mahkamah Agung, terdapat dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor 1875/K/Pdt./1984 dan dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor 879 K/Pdt./1997.

Fokus penelitian menganalisis putusan yang telah ditentukan dengan melihatnya dalam persepsi kepastian hukum, sehingga membuat gugatan masalah dalam penggabungan ini dan melihat dari putusan pengadilan yang sama ada terdapat

perbedaan, sehingga Bambang Joko Winarno (2021) memberikan tanggapannya terhadap ini "Satu hakim membaca undang-undang bisa beda penafsirannya, jika undang-undang itu tidak tegas atau Beda-beda. Undang-undang tidak tegas kata atau, dan, kata dan juga jadi penafsiran, diberi ruang untuk menafsirkan sesuatu ada ruangnya, yang penting jangan nabrak hukum acara, hukum acara tidak boleh disimpangi, memang menyangkut hukum acara, karena undang-undang tidak jelas hanya berpegang pada yurisprudensi. Putusan Pengadilan Negeri Medan terhadap adanya penolakan dalam suatu gugatan, hal tersebut dikarenakan adanya penggabungan perkara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum dalam satu surat gugatan, Bambang Joko Winarno menyatakan bahwa "hal tersebut menyalahi hukum acara perdata akan tetapi dilihat dari kasusnya".

Ali Leonardi N (2021) memberikan penjelasan tentang pemisahan gugatan wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum mengemukakan bahwa "Gugatan Wanprestasi dan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum didasarkan pada ketentuan yang berbeda. Gugatan Wanprestasi didasarkan pada adanya cidera janji dalam perjanjian sehingga salah satu pihak harus bertanggung jawab. Mengenai hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPd.). Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, mencakup, pidana, perdata, maupun pidana dan perdata sekaligus biasanya didasarkan pada Pasal 1365 KUHPd.: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Oleh karenanya, keduanya harus diselesaikan masing-masing secara terpisah."

Selanjutnya Ali Leonardi N (2021) menjelaskan juga dalam wawancara bahwa "apabila gugatan perdata diajukan dengan dasar wanprestasi dan PMH, akan membingungkan hakim karena didasarkan pada dasar hukum yang berbeda sehingga gugatan menjadi tidak jelas (*obscuur libel*). Mengutip artikel Penggabungan Gugatan Wanprestasi dan PMH Tidak Dapat Dibenarkan". Mahkamah Agung bahkan pernah mengeluarkan Putusan MA No. 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 yang menegaskan tentang hal ini. Ditambah lagi dalam Putusan MA No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 dijelaskan bahwa penggabungan PMH dengan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri".

Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum bukan suatu perkara yang jarang terjadi. Perkara ini justru banyak menumpuk dalam pengadilan juga lebih dominan selalu dipisahkan antara wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dikatakan Ali Leonardi (2021) bahwa "*Common law system* dengan adanya pemisahan yang tegas antara hukum kontrak dan Tort, maka jelas sekali terlihat adanya batas antara Contract dan Tort. Sementara di Indonesia, seperti yang telah kita ketahui bersarna, kedua konsep dalam perikatan yaitu wanprestasi dan perbuatan melawan hukum kadang menjadi membingungkan dan seringkali menjadi tidak jelas karena diatur dalam lingkup yang sama atau berkaitan. (Praktiknya, kedua konsep tersebut seringkali salah dipahami dan salah diterapkan serta dianggap kabur perbedaannya. Oleh karenanya seringkali ada beberapa gugatan yang diajukan ke pengadilan tidak diterima oleh pengadilan

dikarenakan dasar gugatannya kabur atau keliru. Salah satu dasar gugatan yang kabur atau keliru yang pernah ditolak oleh pengadilan yaitu penggunaan dasar gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam satu dasar gugatan. Kedua istilah wanprestasi dan perbuatan melawan hukum ini digunakan bersama-sama untuk satu duduk perkara).”

Ali Leonardi N (2021) juga menegaskan bahwa “pemisahan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dikarenakan secara prinsip memang sudah berbeda, dan mempunyai perbedaan baik dalam istilah, ketentuan hukum, dan penerapannya terhadap suatu perkara. Inform”Terkadang batas antara keduanya menjadi tidak jelas ketika diaplikasikan kedalam suatu kasus dan tidak sedikit pula para pengacara dan hakim telah salah dalam mengklasifikasikan suatu kasus yang sebenarnya masuk kedalam lingkup wanprestasi tetapi mereka klasifikasikan masuk kedalam lingkup perbuatan melawan hukum, atau begitu pula sebaliknya dan bahkan ada yang diterapkan keduanya padahal semuanya jelas perbedaannya.”

Kasus Penggabungan gugatan wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum sudah ada sejak lama, juga dinyatakan oleh Ali Leonardi N (2021) bahwa “menjadi salah satu contoh penggabungannya yaitu pada Tahun 2008 yaitu Gugatan yang dilayangkan perusahaan Amerika, North Atlantic Inc. Karena menggabungkan wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak menerima gugatan North Atlantic. Putusan itu diambil oleh majelis hakim pimpinan Eka Budi Prijanta yang dibacakan Senin (23/8/2008). Majelis hakim lebih sependapat dengan argumentasi pihak tergugat, PT Multisari Makasar yang tertuang dalam berkas eksepsi. Pada pertimbangan hukumnya, majelis menyatakan penggabungan antara gugatan wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum itu melanggar tertib acara. Merujuk kepada beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung, akhirnya gugatan North Atlantic dinyatakan tidak bisa diterima.”

Makna Yurisprudensi yang melarang adanya penggabungan gugatan wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum seharusnya sudah merata diterapkan. Akan tetapi, penggabungan masih sering terjadi salah satu faktornya adalah karena adanya para praktisi yang masih belum tepat dalam memaknai suatu duduk masalah perkara yang dijadikan dasar gugatannya. Terhadap hal ini Ali Leonardi N menyatakan bahwa menggabungkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam satu dasar hukum permohonan ganti rugi dalam gugatan di muka pengadilan, pada prinsipnya dapat dilakukan asalkan Penggugat dapat menentukan dengan jelas dan membuktikan dalam gugatannya (posita) dan dalam proses persidangan, dimana perbuatan yang termasuk kedalam lingkup wanprestasi dan bagian mana pula yang termasuk kedalam lingkup perbuatan melawan hukum. Pentingnya perbedaan gugatan berdasarkan perjanjian dan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum ialah karena dalam praktik biasanya Penggugat mulai dengan gugatan karena perbuatan melawan hukum dan atas dasar itulah ia minta ganti rugi. Tergugat menjawab bahwa gugatan berdasar perbuatan melawan hukum tidak dapat diterima dan hanya dapat diterima berdasarkan tidak ditepatinya perjanjian atau wanprestasi.

Hakim akan memeriksa apakah gugatan tersebut berdasarkan perbuatan melawan hukum, dan jika tidak mungkin maka ia akan menolak gugatan itu.

Ranto Sibarani (2021) memberikan pandangannya bahwa "tidak boleh menggabungkan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum berdasarkan yurisprudensi, melihat secara hukum materiil tidak adanya yang mengatur secara tegas terhadap pemisahan terhadap wanprestasi dan perbuatan mealwan hukum, sehingga perlu adanya ketegasan hukum secara undang-undang untuk mengaturnya."

Keputusan Mahkamah Agung Nomor 1875/K/Pdt./1984 yang telah dijadikan suatu yurisprudensi memberikan suatu kaidah hukum yang berbunyi "Penggabungan tuntutan Perbuatan Melawan Hukum dengan Tuntutan Wanprestasi didalam satu Surat Gugatan, tidak dapat dibenarkan menurut tertib beracara perdata, masing-masing tuntutan harus diselesaikan dalam gugatan tersendiri". Selain dasar di atas, adanya pelarangan penggabungan gugatan wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum tegas dikatakan dalam Keputusan Mahkamah Agung No.2643 K/ Pdt/1994, tanggal 28 Mei 1999 dengan Kaidah Hukum "mencampuradukkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan gugatan Wanprestasi tidak dibenarkan."

Penafsiran dari yurisprudensi di atas, dapat dimaknai bahwa pemisahan gugatan wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum menjadi suatu keharusan dalam tertib hukum acara perdata. Banyak menjadi hal yang fatal apabila terjadi suatu penggabungan gugatan tersebut, sehingga menimbulkan kontradiktif terhadap suatu syarat-syarat formil dan materiil suatu gugatan dengan terjadinya gugatan menjadi kabur yang menyebabkan putusan tersebut dapat menjadi *Niet Onvankelijke Verklaard* (N.O).

Pendapat tersebut menjadi acuan yang pasti terhadap menentukan suatu pemisahan gugatan wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum , agar terjadi sinkronisasi antara posita dengan fundamentum petendi/petitum. Hal ini dikarenakan terjadinya suatu dasar gugatan yang terjadi karena adanya suatu perjanjian, akan tetapi dalam petitumnya menuntut adanya sautu perbuatan melawan hukum. Sehingga, antara posita dengan petitum menjadi sejalan. Dasar hukum dalam menentukan suatu gugatan menjadi arah yang paling penting untuk menuntut suatu kerugian atau hak seseorang karena adanya perselisihan. Tidak berlasan jika suatu dasar mengajukan gugatan bercerita adanya suatu kerugian akibat tidak dijalankannya suatu kewajiban yang lahir dari perikatan lalu digugat menjadi suatu Perbuatan Melawan Hukum .

Praktik yang sering terjadi seperti ini, disebabkan karena adanya para praktisi yang menafsirkan suatu hukum perdata materiil yang tidak pada koridornya. Sehingga, relevansi antara perbuatan dengan adanya hukum materiil tidak sinkron yang menyebabkan gugatan tersebut menjadi kabur. Hal seperti inilah yang membuat terjadinya suatu ketidakpastian hukum dalam penerapannya di pengadilan. Sementara itu antara konsep wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum itu kalau ditelisik lebih dalam sangat jauh berbeda, meskipun mempunyai kesamaan adanya

suatu kerugian. Kerugian yang perlu digaris bawahi pada konsep wanprestasi adalah karena adanya suatu kewajiban yang tidak dijalankan karena adanya kesepakatan. Sedangkan kerugian dalam perbuatan melawan hukum adalah karena kerugian yang disebabkan kelalaian yang lahir karena menjadi kewajibannya timbul dari suatu undang-undang.

3.3 Kriteria Pemisahan Gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Pandangan Hakim di Pengadilan Negeri Medan dan Advokat

Pengaturan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi pada dasarnya dengan jelas dan tegas telah dipisahkan dalam KUHPerduta. Perbedaan keduanya diawali oleh adanya perbedaan akibat hukum yang muncul dari hubungan hukum berdasarkan perjanjian dan hubungan hukum berdasarkan undang-undang. Akibat hukum suatu perikatan yang lahir dari suatu perjanjian merupakan akibat hukum yang dikehendaki oleh para pihak, karena telah disepakati dalam perjanjian. Sementara itu, akibat hukum yang lahir dari undang-undang bisa saja tidak dikehendaki oleh para pihak, namun hubungan hukum dan akibat hukumnya ditentukan oleh undang-undang (Isman, 2021).

Terdapat beragam pandangan dan pertimbangan hukum yang didapatkan dari hakim Pengadilan Negeri Medan dan Advokat yang ada di Kota Medan yang sempat diwawancarai. Hakim Pengadilan Negeri berpendapat, tidak boleh terdapat penggabungan gugatan wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum dalam satu surat gugatan. Mendalilkan kedua perkara itu berbeda, sehingga harus diselesaikan secara masing-masing, hanya saja Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam satu pandangan lainnya mempunyai pendapat, bahwa gugatan wanprestasi dan gugatan Perbuatan Melawan Hukum itu dapat digabung, tapi harus melihat kasus yang diajukan ke pengadilan tersebut.

Banyak hakim yang melarang tegas adanya penggabungan gugatan perkara wanprestasi dan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam satu surat gugatan, meskipun begitu larangan tersebut tidak diatur secara tegas. Hanya saja, mengikuti aturan pelarangan dari penggabungan gugatan wanprestasi dan gugatan Perbuatan Melawan Hukum, karena adanya Keputusan Mahkamah Agung melarang untuk penggabungan itu, tidak memaksakan pendapatnya, karena memahami hukum, hakim bersifat bebas dalam memberikan penafsirannya. Berbeda dengan informan dari advokat, ditegaskannya bahwa tidak dibolehkan adanya penggabungan antara gugatan wanprestasi dan gugatan Perbuatan Melawan Hukum, adanya penggabungan gugatan melanggar tertib acara di pengadilan.

Aturan mengenai wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam aturan dan pasal yang berbeda, sehingga benar-benar harus dibedakan dalam pelaksanaan pembuatan gugatan. Informan berdalil mengenai larangan penggabungan gugatan wanprestasi dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan dalil adanya Keputusan Mahkamah Agung Nomor 1875/K/Pdt./1984 dan dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor 879 K/Pdt./1997.

Wanprestasi terdapat Pasal 1234 KUHPerd., sedangkan mengenai Perbuatan Melawan Hukum aturan tertuang dalam Pasal 1365 KUHPerd., sampai dengan Pasal 1380. Meskipun begitu, informan juga menjelaskan, terdapat adanya dua Keputusan dari Mahkamah Agung terkait kasus penggabungan wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum yang pernah diterima, yakni pada Keputusan Mahkamah Agung Nomor 2686 K/Pdt./1985, dan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 886 K/Pdt./2007.

Keputusan Mahkamah Agung Nomor 2686 K/Pdt./1985 tentang adanya keputusan tentang Perbuatan Melawan Hukum , tapi hakim menilai gugatan itu sebenarnya adalah gugatan wanprestasi, sedangkan dalam perkara berupa Keputusan Mahkamah Agung Nomor 886 K/Pdt./2007, adanya ketegasan gugatan yang memisahkan antara isi posita wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum , sehingga menerima gugatan tersebut, dan tidak dinyatakan *obscuur libel* (kabur).

Adanya dualisme dalam menyelesaikan gugatan perkara wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum yang digabungkan dalam satu gugatan, ini dapat membuat keraguan, multitafsir, serta konflik norma, dan informan lebih setuju adanya pemisahan antara gugatan wanprestasi dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum . Jawaban terhadap kriteria pemisahan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam pandangan hakim di Pengadilan Negeri Medan dan Advokat Kota Medan, yang telah mempunyai pengalaman yang sangat banyak dalam menyelesaikan perkara yang dihadapi masyarakat di Kota Medan. Bambang Joko Winarno, Ali Leonardi N, dan Ranto Sibarani, Masing-masing mempunyai pandangan dan pendapatnya dalam memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan.

Maka dalam kriteria pemisahan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dapat di rumuskan dalam bentuk tabel yang menjadi kriterianya berdasarkan yurisprudensi dan pandangan hakim pengadilan medan (Bambang Joko Winarno), dan Advokat Kota Medan (Ali Leonardi N dan Ranto Sibarani Medan) yaitu:

Tabel. I
Kriteria Pemisahan gugatan Wanprestasi dan Perbuatan melawan Hukum .

Kriteria Berdasarkan	Wanprestasi	PMH
Lahirnya	Lahir adanya perjanjian. (1234 KUHPerd.,)	Lahirnya karna Undang-undang (kelalaian). (1365 KUHPerd.,)
Unsur-unsur.	Perjanjian, berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu, berbuat sebahagian atau tidak berbuat sama sekali. (1234 KUHPerd.,)	Adanya suatu perbuatan, Perbuatan tersebut melawan hukum, Adanya kesalahan dari pihak pelaku, Adanya kerugian bagi korban, Adanya hubungan

		kausal antara perbuatan dan kerugian. (1365 KUHPerd.)
Sanksi.	Materiil dan bunga. (1243 KUHPerd.)	Tidak di atur secara tegas dalam ganti rugi
Somasi.	Ada somasi.	Tidak ada somasi.
Hukum yang mengatur	Putusan Mahkamah Agung Nomor 1875/K/Pdt./1984 dan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 879 K/Pdt./1997.	

Teori kepastian hukum seperti yang dijelaskan oleh Utrecht berfungsi sebagai aturan pasti secara hukum, berupa sifatnya yang umum dan dapat diketahui oleh masyarakat umum, dan sekaligus hukum itu dapat memastikan keamanan individu ketika berhadapan dengan hukum. Permasalahan yang diangkat mengenai adanya beragam macam putusan dari Pengadilan Negeri Medan ketika berhadapan dengan masalah gugatan wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum. Gugatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Medan oleh penggugat ada yang digabungkan, dan adakalanya juga dipisahkan, menjadi masalahnya adalah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, kadangkala mengabulkan gugatan yang menggabungkan gugatan wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam satu surat gugatan, dan adakalanya juga menolak gugatan yang mengabulkan dua perkara tersebut dalam satu surat gugatan.

Gugatan yang ditolak terdapat dalam Putusan Nomor 280/Pdt.G/2018/PN Mdn., Putusan Nomor 320/Pdt.G/2019/PN Mdn., sedangkan putusan yang diterima terdapat dalam Putusan Nomor 728/Pdt.G/2016/PN Mdn., Putusan Nomor 584/Pdt.G/2014/PN Mdn. Hasil bacaan terdapat empat putusan, dengan dua hasil akhir berupa putusan yang ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan, membuat permasalahannya sendiri, padahal keempat kasus dari putusan yang telah disebutkan, semuanya menggabungkan gugatan perkara wanprestasi dan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam satu surat gugatan. Secara teori kepastian hukum, maka putusan yang telah ditetapkan dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tidak sesuai dan bertentangan dengan teori kepastian hukum yang ada, padahal kepastian hukum merupakan suatu hal yang mesti ada dan tidak boleh diabaikan dalam memberikan keputusan dalam setiap gugatan yang dilayangkan ke Pengadilan Negeri Medan.

Adanya kontradiksi putusan yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan, maka tentunya dapat ditanggapi dengan negatif oleh advokat dan masyarakat yang ada di Kota Medan, karena putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tidak konsisten, dan jauh dari asas yang terdapat dalam teori kepastian hukum. Selain itu, masalah ini tidak akan memberikan rasa aman bagi individu yang berperkara, karena adakalanya gugatan yang menggabungkan perkara wanprestasi dan gugatan Perbuatan Melawan Hukum diterima, kadang ditolak. Tentu ini tidak dapat dibiarkan

begitu saja, karena akan terus berlangsung pada putusan-putusan setelahnya, sehingga dapat berimbang putusan merupakan hak sewenang hakim tanpa tunduk kepada aturan perundang-undangan yang telah ada. Padahal hakim selain mempunyai kewenangan dalam memberikan ketentuan keputusan kepada setiap orang yang berperkara, di lain pihak hakim diwajibkan untuk taat aturan yang ada, sebagai pegangan dan pedoman dalam memberikan keputusan hukum yang adil dan tentunya untuk menjamin kepastian hukum itu dapat berjalan dengan baik dan terealisasi pada setiap keputusan yang dihasilkan.

Keempat keputusan Pengadilan Negeri Medan, dengan dua model hasil keputusan atau penetapannya, yakni mengabulkan dan tidak mengabulkan gugatan yang menggabungkan gugatan wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum secara umum tentu gugatan itu terhadap perkara-perkara yang berbeda, sesuai dengan permasalahan yang diajukan oleh setiap penggugat. Hanya saja, setelah diuraikan satu persatu, terdapat di dalamnya masalah wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum yang dijadikan alasan gugatan tersebut. Identifikasi terhadap empat keputusan pun terlihat, adanya dalil-dalil hukum yang dijadikan oleh setiap penggugat dalam berkas perkaranya, baik gugatan yang diterima maupun gugatan yang ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan. Selanjutnya pada tahapan penjelasan, majelis hakim pun dalam bahan pertimbangannya, menjadikan dalil-dalil aturan perundang-undangan dalam membuat atau menentukan hasil keputusan pada setiap gugatan.

Menjadi masalahnya, ketika hakim menolak atau tidak mengabulkan gugatan yang menggabungkan perkara wanprestasi dan gugatan Perbuatan Melawan Hukum, majelis hakim berargumen dengan dalil Keputusan Mahkamah Agung Nomor 1875/K/Pdt./1984 dan dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor 879 K/Pdt./1997. Kedua keputusan dari Mahkamah Agung menegaskan, penggabungan gugatan wanprestasi dan sekaligus gugatan Perbuatan Melawan Hukum merupakan suatu pelanggaran terhadap tertib beracara di pengadilan. Keputusan yang baik adalah keputusan yang memberikan kepastian hukum, dan dapat memberikan hukum yang sama pada kasus yang sama, bukan sebaliknya mengabaikan kepastian hukum, dan melakukan putusan yang beragam dalam permasalahan yang sama, dalam hal ini perkara gugatan yang menggabungkan gugatan wanprestasi dan gugatan Perbuatan Melawan Hukum.

4. Penutup

Berdasarkan penelitian dan pembahasan diatas maka disimpulkan bahwa Gugatan wanprestasi dan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ditilik dari perspektif hukum perdata materil, dengan jelas terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd.) gugatan wanprestasi harus didasari dengan ada perikatan/perjanjian terdapat Pasal 1234 KUHPerd., dan timbulnya hak menuntut pada prinsipnya membutuhkan somasi. Sedangkan mengenai Perbuatan Melawan Hukum aturan tertuang dalam Pasal 1365 KUHPerd., Perbuatan yang melanggar hukum (undang-undang) atas perbuatannya menimbulkan kerugian kepada orang lain, dan hak tanpa

somasi. Sehingga kedua pasal tersebut menjadi pemisah antara gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Landasan yang dijadikan acuan dalam membuat gugatan wanprestasi dan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ada di tegaskan dalam dua keputusan Mahkamah Agung, yakni Keputusan Mahkamah Agung Nomor 1875/K/Pdt./1984 dan dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor 879 K/Pdt./1997. Kedua keputusan dari Mahkamah Agung menyatakan, penggabungan gugatan wanprestasi dan sekaligus gugatan Perbuatan Melawan Hukum merupakan suatu pelanggaran terhadap tertib beracara di pengadilan. Kriteria pemisahan gugatan wanprestasi dan gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diterangkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan dan Advokat Kota Medan. Dijelaskan, dalam gugatan wanprestasi harus dilihat ada atau tidaknya suatu perjanjian yang dilakukan antara penggugat dan tergugat. Kerna gugatan wanprestasi lahir disebabkan adanya perjanjian, sedangkan Perbuatan melawan hukum disebabkan kerna undang-undang. Dari segi unsur-unsurnya ditinjau juga terdapat perbedaan, baik dari segi sanksi jugsu merupakan hal yang berbeda, yang mana wanprestasi ganti ruginya di atur, sedangkan wanprestasi tidak di atur. Hakim Pengadilan Negeri berpendapat, tidak boleh terdapat penggabungan gugatan wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum dalam satu surat gugatan. Hakim berpendapat kedua perkara berbeda, harus diselesaikan secara masing-masing. Advokat kota Medan berpendapat, tidak dibolehkan adanya penggabungan antara gugatan wanprestasi dan gugatan Perbuatan Melawan Hukum, adanya penggabungan gugatan melanggar tertib acara di pengadilan, sebab antara wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan pasal yang berbeda dalam KUHPerd. Disarankan kepada Hakim Pengadilan Negeri Medan dan Advokat Kota Medan, agar mentaati setiap landasan hukum yang dijadikan pedoman dalam perkara wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum, sesuai dengan hukum materil.

Referensi

- Asikin, H. Z., & Sh, S. U. (2019). *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Prenada Media.
- Chandraesmi, H. (2016). *Kajian Mengenai Gugatan Melawan Hukum Terhadap Sengketa Wanprestasi*.
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika.
- Hutagalung, S. M. (2019). *Praktik Peradilan Perdata*. Sinar Grafika.
- Isman, I. (2021). Kumulasi Gugatan Antara Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi. *Jurnal Yudisial*, 14(1), 57–78.
- M Rasyid, L., & Herinawati, H. (2015). *Hukum Acara Perdata*. Unimal Press.
- Munawaroh, Nafiatul. (2022). "Cara Membuat Gugatan Perdata", Diakses dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-membuat-surat-gugatan-cl2871>, tanggal 28 Oktober 2022.
- Sabda, I. N. S. (2015). Syarat Materil Dan Formal Gugatan Rekonvensi Dalam Perkara Perdata. *Lex Privatum*, 3(2).
- Safira, M. E. (2017). Hukum Acara Perdata. *Journal Of Chemical Information And Modeling*, 1.
- Satjipto, R. (2006). *Hukum Dalam Jagat Ketertiban. UKI Pers, Jakarta*.
- Sutantio, R., & Oeripkartawinata, I. (2009). *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan*

Praktek. Mandar Maju.

Yulia, Y. (2018). *Hukum Acara Perdata*. Unimal Press.

Wawancara dengan Ali Leonardi N, Advokat Medan, tanggal 08 Oktober 2022.

Wawancara dengan Bambang Joko Winarno, Hakim Pengadilan Negeri Medan, tanggal 30 Juli 2021.

Wawancara dengan Ranto Sibarani, Advokat Medan, tanggal 09 September 2021.